

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- . *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Attamimi, A. Hamid S. *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- . *Hukum Pidana Adat*. Cetakan ulang. Bandung: Alumni, 2023.
- Hazairin. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas, 1981.
- Hermansyah. *Hukum Adat Dayak dan Kearifan Lokal*. Pontianak: Pustaka Horizon, 2016.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan revisi. Bandung: Refika Aditama, 2024.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum dan Masyarakat*. Edisi revisi. Bandung: Angkasa, 2023.
- Saleh, Roeslan. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Refika Aditama, 2023.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1986.
- Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Van Vollenhoven, Cornelis. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1931.

### **Jurnal, Laporan Penelitian, dan Karya Ilmiah**

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. *Komunitas Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Laporan riset. Banjarmasin: AMAN Kalimantan Selatan, 2025.
- . *Komunitas Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Laporan riset. Banjarmasin: AMAN Kalimantan Selatan, 2025.
- . *Komunitas Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Balangan*. Laporan riset. Banjarmasin: AMAN Kalimantan Selatan, 2025.
- Marlina. “Pidana Adat dalam Perspektif Masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan.” Laporan penelitian. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2021.
- Nurjaya, I Nyoman. “Hukum Adat sebagai *Living Law* dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023): 1–20.

Syukri Albani, Muhammad. "Hukum Adat dalam Perspektif *Restorative Justice*." *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 1–25.

### **Internet**

Katadesa.id. "Mengenal Budaya Dayak Meratus." Diakses 30 Oktober 2025. <https://katadesa.id>

Meratus Geopark. "Mari Berkenalan dengan Suku Dayak Meratus." Diakses 30 Oktober 2025. <https://meratusgeopark.org>

Rusmanadi. "Menakar Kearifan Dayak Meratus." *Antara Kalimantan Selatan*. Diakses 30 Oktober 2025. <https://kalsel.antaranews.com>

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.